

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL SASINDO UNPAM

VOLUME 4 NO. 2, DESEMBER 2024

CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAKARTA PADA PRESPEKTIF GEN MILENIAL DAN GEN Z

Aisyah Nurafifah^{1)*}, Ardilla²⁾

¹⁾Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

²⁾ Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Pamulang, Jl. Raya Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310

aisyahmurafifah447@gmail.com

Diterima: 18 Desember 2024

Direvisi: 16 Januari 2025

Disetujui: 18 Januari 2025

ABSTRAK

Pemilihan gubernur tahun 2024 sudah semakin dekat waktunya dan serentak dilakukan di berbagai daerah, termasuk kota DKI Jakarta dimana pemungutan suara diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Pemilih yang berhak mengikuti pencoblosan suara ini adalah sudah berusia 17 tahun dan menunjukkan identitas bertempat tinggal di daerah pemilihan. Data pemilih khusus daerah DKI Jakarta terlihat yang paling banyak dominan pada generasi milenial dan generasi z. Kandidat pemimpin daerah harus melihat keinginan atau harapan dari datapenduduk tersebut agar dapat memperoleh suara terbanyak pada saat pemilihan termasuk gaya atau model kepemimpinan apa yang cocok oleh generasi tersebut. Tujuan dari penelitian sebenarnya untuk mengetahui model kepemimpinan pemilihan kepala daerah pada perspektif generasi milenial dan z. Metode yang dipakai adalah metode kualitatif dengan teknik menyebarkan kuesioner melalui google form ke informan generasi milenial dan z yang berada di daerah DKI Jakarta. Hasil dari data penelitian yang dikumpulkan generasi memilih gaya kepemimpinan yang demokratis, edukatif, motivatif dan inovatif. Melihat pula tidak hanya aktif di media sosial menyampaikan informasi-informasi program yang dilakukan oleh kandidat, tetapi yang paling utama adalah program kerja yang akan dijalankan dalam membenahi permasalahan yang ada di kota DKI Jakarta untuk dapat transisi dari ibukota menjadi kota Global. Parakandidat dari pandangan generasi milenial dan z, akan lebih memilih namanya pada saat pencoblosan adalah nama yang lebih banyak memperhatikan juga kaum muda untuk dapat memberikan wadah berkarya dan produktif.

Kata-kata kunci: latar belakang, tujuan, metode, hasil, kesimpulan.

ABSTRACT

The 2024 regional head elections are approaching and will be held simultaneously in various regions, including DKI Jakarta. The voting in DKI Jakarta is scheduled for November 27, 2024. Eligible voters must be 17 years old and able to prove their residency in the electoral district. The data on voters in DKI Jakarta shows a dominance of the millennial and Z generations. It is important for the candidates running for regional leader positions to understand the desires and hopes of the population in order to secure the most votes. This includes understanding what leadership style or model is suitable for these generations. The purpose of the study was to determine the leadership model for regional head elections from the perspective of the millennial and Z generations. The method used was qualitative, involving the distribution of

questionnaires via Google Forms to millennial and Z generation informants in the DKI Jakarta area. The research data collected showed that the millennial and Z generations prefer a democratic, educative, motivational, and innovative leadership style. They are also actively using social media to convey information about candidates' programs. However, the most crucial factor for them is the candidates' work programs aimed at addressing the issues in the city of DKI Jakarta as it transitions from being the capital city to a global city. From the perspective of the millennial and Z generations, candidates with a focus on providing opportunities for young people to work and be productive will be preferred during the voting process.

Keywords : *generations, millennials, gen Z, perspectives*

PENDAHULUAN

Indonesia mengadopsi sistem demokrasi modern dengan perwakilan rakyat, karena demokrasi langsung tidak praktis di era modern. Kata "demokrasi" telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya di kalangan akademisi dan elit politik, tetapi juga di kalangan generasi muda. Meskipun demokrasi memiliki makna yang mendalam dan sejarah panjang, penerapannya seringkali tidak sesuai dengan idealismenya. Demokrasi seringkali diartikan secara sempit sebagai kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga fokusnya hanya pada aspek politik.

Indonesia, sebagai negara besar yang merdeka, telah mengenal demokrasi sejak awal. Pengalaman panjang ini seharusnya menjadikan Indonesia mahir dalam praktik demokrasi. Namun, dalam perjalanan bangsa, masalah utama yang dihadapi adalah bagaimana mewujudkan demokrasi secara ideal. Meskipun belum sepenuhnya terpenuhi hak-hak warga negara, Indonesia telah melalui transisi dari berbagai model demokrasi, melewati empat fase dengan berbagai tantangan: demokrasi parlementer (1945-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), demokrasi Pancasila (1965-1998), dan demokrasi reformasi (1998 hingga sekarang).

Penerapan demokrasi di Indonesia terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari masyarakat, negara, ekonomi, hingga politik. Di masyarakat, demokrasi terwujud dalam kegiatan gotong royong. Dalam kehidupan bernegara, demokrasi telah diterapkan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, salah satunya melalui penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan wujud nyata kedaulatan rakyat dan menjadi sarana penting dalam menjaga tegaknya negara Republik Indonesia.

Pembahasan mengenai demokrasi tidak dapat dipisahkan dari partisipasi politik. Partisipasi politik merupakan topik yang menarik karena melalui partisipasi politik, individu-individu dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Partai politik berperan penting dalam menampung aspirasi masyarakat dalam konteks partisipasi politik. Kata "partai politik" sendiri merupakan gabungan dari "partai" dan "politik". Kata "partai" berasal dari bahasa Latin "partire" yang berarti "membelah".

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta, akan diadakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024. Data pemilih dari Pantarlih

menunjukkan bahwa terdapat 8.248.283 jiwa di enam wilayah DKI Jakarta yang berhak memilih (Izan, 2024). DKI Jakarta memiliki sejumlah permasalahan yang perlu ditangani oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih selama masa jabatan lima tahun ke depan. Oleh karena itu, masyarakat harus memilih pemimpin yang tepat dan diharapkan dapat mengatasi tantangan tersebut. Terdapat tiga pasangan calon yang telah mendaftar, yaitu Ridwan Karmil dan Suswono (nomor 1), Pramono Anung dan Rano Karno (nomor 2), serta Dharma Pongrekun dan Kun Wardana (nomor 3).

Ketiga pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda, berdasarkan pengalaman dan visi mereka. Pasangan Ridwan Karmil dan Suswono, didukung oleh PKS, dikenal memiliki kepemimpinan visioner dan berdedikasi. Ridwan Karmil, seorang arsitek, dikenal kreatif, sementara Suswono memiliki integritas dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global (Humas PKS, 2024). Pramono Anung, dikenal sebagai pekerja keras dan tidak banyak bicara, berpasangan dengan Rano Karno, aktor yang terkenal dengan perannya sebagai Si Doel, sehingga memiliki kedekatan dengan budaya Betawi (Humas PKS, 2024). Pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, yang maju melalui jalur independen, menyerukan komitmen untuk menjadikan Jakarta lebih aman dan memperhatikan kesejahteraan serta keadilan sosial bagi rakyat kecil (Anton, 2024). Visi pasangan ini, "Selamatkan Jiwa Keluarga Kita", mencakup lima misi: kebebasan beribadah, pencabutan dan perbaikan kebijakan yang merugikan rakyat, layanan anti-korupsi, perbaikan layanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pendidikan berakhlak (Puspapertiwi & Dzulfaroh, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur secara sistematis, jelas, dan dapat diulang. Metode ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan penggabungan karya-karya penelitian dan pemikiran yang telah diteliti sebelumnya. Data yang dikumpulkan berasal dari jurnal ilmiah, buku elektronik (ebook) yang relevan, catatan artikel, dan opini media yang berkaitan dengan sosiologi politik dan demokrasi. Penelitian ini berfokus pada pengaruh media sosial, demografi, dan partisipasi politik generasi milenial dan Gen Z dalam dinamika demokrasi. Melalui perspektif sosiologi politik dan demokrasi, penelitian ini menganalisis hubungan antara masyarakat dan negara, khususnya dalam dinamika hubungan kekuasaan dan kewenangan di dalam suatu negara.

Analisis dalam penelitian ini mencakup dinamika demokrasi, kekuasaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya masyarakat, seperti struktur sosial, agama, ekonomi, Indonesia mengadopsi sistem demokrasi modern dengan perwakilan rakyat, karena demokrasi langsung tidak praktis di era modern. Kata "demokrasi" telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, tidak hanya di kalangan akademisi dan elit politik, tetapi juga di kalangan generasi muda. Meskipun demokrasi memiliki makna yang mendalam dan sejarah panjang, penerapannya seringkali tidak sesuai dengan idealismenya. Demokrasi seringkali diartikan secara sempit sebagai kekuasaan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat, sehingga fokusnya hanya pada aspek politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DEMOKRASI DAN PARTISIPASIPOLITIK GENERASI MILENIAL DAN GEN Z

Penelitian ini mengkaji pengaruh media sosial, demografi, dan partisipasi politik generasi milenial dan Gen Z terhadap dinamika demokrasi. Berfokus pada perspektif sosiologi politik dan demokrasi, penelitian ini menganalisis hubungan antara masyarakat dan negara, khususnya dalam dinamika hubungan kekuasaan dan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur secara sistematis, jelas, dan dapat diulang, dengan mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menggabungkan karya-karya penelitian dan pemikiran yang telah diteliti sebelumnya. Data yang dikumpulkan berasal dari jurnal ilmiah, buku elektronik (ebook), catatan artikel, dan opini media yang berkaitan dengan sosiologi politik dan demokrasi. Analisis dalam penelitian ini mencakup dinamika demokrasi, kekuasaan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya masyarakat, seperti struktur sosial, agama, ekonomi, kelas sosial, kelompok kepentingan (media), serta sistem nilai dan kepercayaan.

Hoaks menjadi masalah serius karena mudah menyebar di media sosial, terutama di kalangan milenial dan Gen Z yang aktif menggunakan platform digital. Data menunjukkan bahwa 60% pengguna internet di Indonesia terpapar hoaks saat berinteraksi di media sosial, sementara hanya 21% hingga 36% yang mampu mengenali berita hoaks. Menanggapi fenomena ini, pemerintah terkadang membatasi akses informasi, meskipun tidak semua informasi mengandung hoaks. Penggunaan pendekatan represif ini berpotensi membatasi kebebasan sipil. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah diharapkan memberikan payung hukum dan perlindungan bagi pengguna media sosial, menjamin kebebasan mereka, dan menciptakan rasa aman dalam mengakses informasi digital.

Pembangunan politik yang berfokus pada milenial dan Gen Z masih kurang konkret dalam implementasinya. Peta jalan pendidikan politik bagi mereka belum cukup emansipatif dan belum sepenuhnya mengukuhkan prinsip-prinsip kesetaraan dalam struktur politik. Misalnya, kaderisasi partai cenderung menciptakan relasi kekuasaan antara kader senior dan junior. Milenial dan Gen Z masih dianggap sebagai ornamen politik, dengan potensi suara mereka yang besar lebih diutamakan untuk memenangkan kontestasi, bukan sebagai bagian integral dari sistem politik.

Diskursus politik saat ini kurang menarik bagi milenial dan Gen Z. Fenomena politik lebih banyak menampilkan praktik atau pertunjukan politik yang kurang bijak, bahkan terkadang kasar. Contohnya, pelemahan posisi kelompok oposisi akibat bergabungnya sejumlah partai dalam kabinet pemerintahan, sehingga fungsi kontrol terhadap pemerintahan menjadi lemah. Lemahnya penegakan hukum, kasus korupsi dan penyelewengan anggaran, serta pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) semakin memperkuat ketidakpercayaan milenial dan Gen Z terhadap perbaikan kualitas demokrasi.

Praktik politik kontestasi antar partai politik, seperti saling menjatuhkan kandidat, pencekalan kandidat, dan monopoli calon oleh beberapa partai, semakin memperburuk situasi.

Dominasi politik elektoralisme menjadikan kontestasi politik sebagai pertarungan untuk menjagokan kandidat, terjebak dalam drama politik penuh intrik, dan akhirnya terfokus pada menang atau kalah. Politik terkesan eksklusif, hanya diakses oleh kelompok berkuasa tertentu, dan lebih mementingkan mobilisasi modal dan massa. Fenomena ini menjadi tradisi politik yang diwariskan kepada milenial dan Gen Z sebagai penerus demokrasi. Kekecewaan ini menyebabkan apatisisme dan skeptisisme di kalangan mereka terhadap dunia politik. Meskipun beberapa milenial dan Gen Z bergabung dengan partai politik, mereka seringkali memiliki akses politik dan privilese tertentu, seperti berasal dari dinasti politik. Kesimpulannya, kebebasan sipil dan penggunaan hak politik bagi milenial dan Gen Z masih terbatas, karena mereka diperkenalkan dengan realitas politik yang sarat dengan kepentingan.

B. MEDIA SOSIAL SEBAGAI ARENA POLITIK

Menjelang pesta demokrasi, ruang publik sering dipenuhi dengan berbagai sudut pandang dan komentar yang bersifat destruktif. Media sosial, sebagai ruang publik virtual yang diakses oleh semua orang, termasuk milenial dan Gen Z, menjadi arena adu narasi. Narasi politik yang hanya menawarkan citra, sensasi, dan selebrasi, mendominasi aktivitas di ruang publik virtual. Perdebatan di media sosial cenderung membahas hal-hal yang bersifat elementer dan instrumental, seperti kritik yang tidak berdasar, komentar yang tidak relevan dengan akal sehat, bahkan kekerasan simbolik, sehingga perdebatan jauh dari substansi.

Wacana dan percakapan politik di media sosial yang tidak sehat membuat sebagian warga (netizen) kesulitan mengidentifikasi dan mengorganisir wacana atau isu kolektif yang berorientasi pada kepentingan publik. Diskursus dan kebebasan untuk mengorganisir opini, melawan dominasi wacana tertentu, terhambat oleh keberadaan UU ITE. UU ITE seringkali disalahgunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat, seperti terlihat dalam kasus-kasus pelaporan antar netizen berdasarkan pelanggaran UU ITE. Fenomena buzzer semakin memperburuk situasi di ruang publik virtual. Buzzer menjadi alat politik bagi rezim berkuasa untuk mempropagandakan isu-isu yang menguntungkan mereka dan mempertahankan kekuasaan. Kemampuan mereka dalam mengelola isu dan wacana, didukung oleh teknologi, tim kerja (kelompok intelektual), dan kanal media, serta narasi terstruktur yang dirancang untuk memanipulasi persepsi netizen, semakin mempersulit upaya untuk membangun ruang publik yang sehat dan berintegritas.

Fenomena buzzer semakin memperkeruh ruang publik virtual. Mereka menjadi alat politik bagi rezim berkuasa, menyebarkan propaganda yang menguntungkan mereka dan mempertahankan kekuasaan. Kemampuan mereka dalam mengelola isu dan wacana, didukung oleh teknologi, tim kerja (kelompok intelektual), dan kanal media, serta narasi terstruktur yang dirancang untuk memanipulasi persepsi netizen, semakin mempersulit upaya untuk membangun ruang publik yang sehat dan berintegritas.

Percakapan politik seharusnya akrab dengan wacana kepublikan agar menjadi representasi dan medium komunikasi politik yang sehat. Ruang publik virtual sebagai arena inklusif memungkinkan terciptanya ekspresi dan ekspektasi publik yang beragam, namun hal ini terhambat oleh keberadaan buzzer yang mengendalikan narasi dan memanipulasi opini. Untuk

membangun ruang publik virtual yang sehat, diperlukan upaya untuk melawan dominasi buzzer dan mempromosikan percakapan politik yang berfokus pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik kelompok tertentu.

Diskursus politik di kalangan milenial dan Gen Z cenderung berfokus pada isu-isu yang berdampak langsung pada kehidupan mereka dan lingkungan sekitar. Mereka menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar, seperti jaminan pendidikan, akses layanan pemuda, fasilitas pengembangan diri, kebebasan berekspresi, dan dukungan terhadap pilihan hidup mereka.

C. LITERASI TERHADAP KAUM MILENIAL DAN KAUM GEN Z

Literasi politik adalah kewajiban setiap warga negara untuk memahami politik dan keberlangsungan demokrasi. Literasi politik bukan hanya tentang memahami tahapan dan mekanisme pemilihan, tetapi juga tentang memahami dampak dari pilihan politik yang diambil. Milenial dan Gen Z menjadi kunci dalam menentukan kualitas politik dan demokrasi di Indonesia. Kemampuan literasi politik yang dimiliki akan membuat mereka kritis terhadap pilihan politik mereka.

Ada empat sumber utama yang membentuk persepsi politik milenial dan Gen Z: media sosial, keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pertemanan. Literasi politik berperan penting dalam membentuk nilai dan pengetahuan politik, seperti kemampuan menganalisis pilihan politik, memahami hak-hak politik, mengembangkan nilai-nilai demokrasi, dan berpartisipasi dalam diskursus politik.

Meskipun akses internet sudah merata, kemampuan masyarakat untuk mengolah informasi dan berpikir kritis belum sepenuhnya berkembang. Literasi politik memiliki korelasi positif dengan kemampuan seseorang dalam mengidentifikasi informasi, dan hal ini dipengaruhi oleh usia, pendidikan, jenis kelamin, dan tempat tinggal.

Di media sosial, isu politik, kesehatan, dan agama sering menjadi topik utama. Isu-isu tersebut terkadang memicu sentimen antar netizen, sehingga polarisasi, politik identitas, pemelintiran isu, penistaan, dan kekerasan simbolik dalam politik sering terjadi. Literasi politik menjadi solusi untuk mengurangi gejolak yang terus berlanjut.

Perangkat penyelenggara dan pengawasan Pemilu sudah dimaksimalkan melalui peraturan perundang-undangan, namun pengawalan Pemilu membutuhkan dukungan dan partisipasi warga. Diseminasi literasi politik kepada seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penentu arah demokrasi di masa depan. Kontribusi penuh dari milenial dan Gen Z akan mempercepat transformasi demokrasi. Dengan kemampuan literasi politik yang dimiliki, mereka dapat membangun budaya dan diskursus politik yang sehat, sehingga tercipta sistem politik yang bermartabat.

KESIMPULAN

Perubahan demografi dan kemajuan teknologi informasi telah menjadikan milenial dan Gen Z sebagai aktor kunci dalam dinamika politik dan demokrasi. Media sosial membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam membangun narasi publik, namun narasi yang mereka konstruksikan cenderung apolitis sebagai bentuk kritik terhadap wacana politik dominan. Milenial dan Gen Z menginginkan politik partisipatif yang egaliter, menolak menjadi bagian dari skenario kekuasaan politik, dan melihat politik sebagai sesuatu yang sarat dengan kepentingan. Meskipun demikian, mereka memiliki nalur politik dan sebagian dari mereka aktif dalam proses Pemilu, berusaha untuk merefleksikan pengalaman politik mereka, melakukan moderasi partisipasi pengawasan, dan mengurangi risiko dan potensi kecurangan. Kemampuan literasi politik yang dimiliki oleh milenial dan Gen Z dapat membangun budaya dan diskursus politik yang sehat, sehingga tercipta sistem politik yang bermartabat.

REFERENSI

- Abdillah. (2023). KPU DKI Jakarta: Lebih dari 50 Persen Pemilih DKI Gen Z dan Millennial. Liputan6.Com. <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5356228/kpu-dki-jakarta-lebih-dari-50-persen-pemilih-dki-gen-z-dan-millennial>
- Anton. (2024). Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Memulai Kampanye di Jakarta: Fokus Pada Pembentukan Pemprov dan Janji Kesejahteraan Masyarakat. Suaraindonesia.Com. <https://suaraindonesia.com/dharma-pongrekun-dan-kun-wardana-memulai-kampanye-di-jakarta-fokus-pada-pembentukan-pemprov-dan-janji-kesejahteraan-masyarakat/>
- Izan, K. (2024). Pemilih di pilkada Jakarta 8,2 juta orang. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/4266787/pemilih-di-pilkada-jakarta-82-juta-orang>
- Habermas, Jürgen. 1989. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Juditha, Christiany dan Darmawan, Josep. 2018. Penggunaan Media Sosial Dan Partisipasi Politik Generasi Milenial. Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik 22(2)
- Mujani, Saiful. 2019. Riset Consulting Tahun 2019. Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)
- Saputro, Eko Rachmat. 2022. Media Sosial Sebagai Sarana Komunikasi Kandidat Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kota Makassar Tahun 2020. Jurnal Politik Profetik 10(1)
- Sugiyanto, Catur. 2021. Pengaruh Struktur Umur Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia 21(1)